

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu

Chariza Putri

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
charizaputri27@gmail.com

Yefriza

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
yefriza@unib.ac.id

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak belanja pemerintah daerah, pengangguran terbuka, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu pada periode 2019-2023. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder, metode analisis yang dipakai adalah regresi data panel, dan model yang dipakai adalah *fixed effect model*. Pengujian ekonometrik melakukan pengujian asumsi klasik, dengan memakai uji t, uji F dan koefisien determinasi (R²) untuk menguji hipotesis. Hasil yang diperoleh memberikan petunjuk bahwasanya variabel belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. Variabel belanja pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif, sedangkan dua variabel lainnya memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan.

Kata Kunci Belanja Pemerintah Daerah , Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Di Provinsi Bengkulu, tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang memerlukan perhatian serius. Kemiskinan tidak hanya berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, namun juga berdampak pada stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kemiskinan merupakan langkah penting dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan menjadi tantangan besar bagi banyak daerah, termasuk Provinsi Bengkulu (Septadarman & Rambe, 2023). Walaupun pemerintah melaksanakan banyak usaha guna mengurangi kemiskinan, namun angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tetap tinggi (Anggraeni & Haryanto, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu (2024), terjadi perubahan angka yang signifikan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2019 hingga 2023. Berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah berupaya menurunkan angka kemiskinan lewat peningkatan belanja pemerintah daerah (BPD). Belanja daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian seberapa besar dampak peningkatan belanja tersebut terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan faktor signifikan yang memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan (Panjaitan & Anitasari, 2023). Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja dan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kemiskinan bagi masyarakat. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan (Berliani, 2021). Pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan ketersediaan sumber daya ekonomi dapat memperburuk kondisi perekonomian rumah tangga, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang masih berkembang seperti Bengkulu. Penelitian ini akan menyoroti pengaruh belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka, serta laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada periode 2019 hingga 2023. Kajian ini memiliki relevansi tinggi karena mencakup masa pandemi COVID-19, yang memiliki pengaruh besar pada perekonomian dan struktur kemiskinan di banyak tempat.

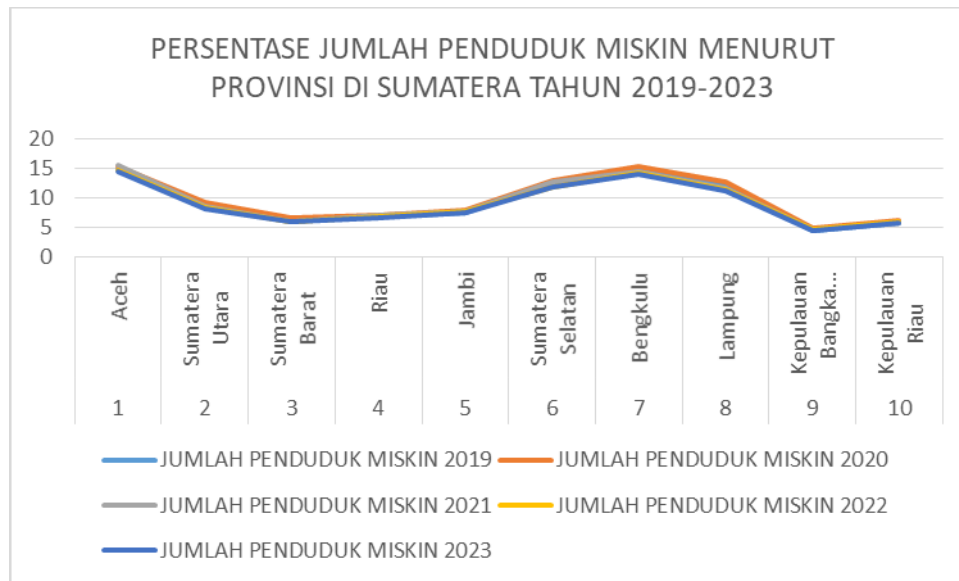
Melalui investasi dalam infrastruktur dan program sosial, belanja pemerintah daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fadlillah et al., 2016). Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengentaskan kemiskinan (Hasanudin, 2019). Ini sejalan dengan Teori Keynesian, yang berpendapat bahwa peningkatan belanja pemerintah berkontribusi pada peningkatan permintaan agregat. Peningkatan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga yang berhubungan langsung dengan peningkatan kemiskinan. Ini selaras teori keseimbangan pasar tenaga kerja, peningkatan pengangguran berbanding lurus dengan peningkatan kemiskinan akibat penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, teori kemiskinan struktural menunjukkan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor struktural penyebab kemiskinan.

Variabel pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan tekanan pada sumber daya, lapangan kerja, dan layanan sosial, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kemiskinan (Putri et al., 2021). Ini sesuai dengan teori Malthusian, yang memberikan pernyataan bahwa taraf hidup dan kemiskinan dapat diperburuk jika pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Febriani et al., 2021).

Menurut Sen (1999), kemiskinan bukan hanya kurangnya pendapatan tetapi juga terbatasnya kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang diinginkannya. Pendekatan sen, yang menggabungkan indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah kekurangan finansial, namun juga keterbatasan kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bermakna. Pembangunan harus bertujuan tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan materi tetapi juga pada perluasan kemampuan-kemampuan tersebut (Ekaputri et al., 2023).

Temuan ini mempunyai rumusan masalah yaitu, Bagaimana pengaruh belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu? Tujuan penelitian adalah mengkaji pengaruh belanja pemerintah daerah, pengangguran terbuka, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bengkulu pada periode 2019-2023. Dengan memahami berbagai faktor yang mendasari kemiskinan di Provinsi Bengkulu, temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Berikut ini grafik persentase jumlah penduduk miskin menurut Provinsi di Sumatera tahun 2019-2023:



Gambar 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Sumatera Tahun 2019-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2023)

Gambar 1 menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki proporsi penduduk miskin tertinggi di Sumatera pada tahun 2019 hingga 2023, menempati peringkat kedua setelah Provinsi Aceh. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan jumlah penduduk miskin terendah, dengan angka yang selalu berada di bawah 6% setiap tahun. Dengan melihat gambar 1, Provinsi Bengkulu mempunyai permasalahan yang serius terkait tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di wilayahnya.

LANDASAN TEORI

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah problematika sosial yang rumit dengan berbagai aspek. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2023), kemiskinan adalah keadaan ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, tingkat kemiskinan umumnya diukur dari tingkat pengeluarannya. Kemiskinan tidak semata-mata berhubungan dengan minimnya pendapatan, tetapi juga dengan terbatasnya akses terhadap layanan mendasar, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta air bersih. Ada dua macam teori tentang kemiskinan diantaranya adalah teori lingkaran setan kemiskinan (Ragnar Nurkse) dan teori struktural. Teori lingkaran setan kemiskinan berpendapat bahwa kemiskinan saling memperburuk situasi. Dalam lingkaran ini, rendahnya pendapatan menyebabkan kurangnya tabungan dan investasi, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam kemiskinan tanpa kejelasan jalan keluarnya.

Teori struktural, berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individu, namun akibat ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi kelembagaan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan. Menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem diukur dengan pendapatan kurang dari US\$1,90 per hari.

Belanja Pemerintah Daerah

Menurut RPJMD, belanja pemerintah daerah adalah dana yang digunakan pemerintah daerah dalam mendanai program, kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan

pengorganisasian pemerintahan. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Perda, pengelolaan belanja daerah harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas.

Bastian et al., (2006) menjelaskan bahwa belanja daerah dapat dibagi menjadi dua komponen utama. Belanja operasional, yang mencakup pengeluaran rutin seperti gaji dan umum. Rincian ini penting karena komposisi belanja daerah dapat mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Dan teori pertumbuhan ekonomi juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor produktif lainnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Ekspansi ekonomi memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, menaikkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup secara umum. Kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Misalnya, belanja pendidikan yang efektif dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut International Labour Organization (2015), pengangguran mencakup orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan mampu mendapatkan pekerjaan baru dalam waktu dekat. Selain definisi umum, pengangguran dapat dikategorikan lebih lanjut. Misalnya, pengangguran terbuka merujuk pada individu yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Sementara itu, pengangguran terselubung menggambarkan situasi di mana seseorang bekerja namun dengan jam kerja yang jauh lebih sedikit dari yang seharusnya atau di bawah kemampuannya (Todaro & Smith, 2015).

Hal ini selaras dengan teori klasik ekonomi yang memberikan pernyataan bahwasanya peningkatan pengangguran menyebabkan kemiskinan, karena penganggur kehilangan pendapatan utama dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Teori Keynesian juga menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan. Pengangguran yang berkepanjangan dapat mendorong masyarakat ke dalam kemiskinan, terutama jika mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian alternatif.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan dinamika peralihan total individu yang mendiami sebuah daerah dalam periode masa tahunan. Fertilitas, mortalitas, dan migrasi adalah komponen yang memengaruhi pertumbuhan penduduk (Todaro & Smith, 2015). Pertumbuhan penduduk adalah fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan non alam. Pertumbuhan penduduk yang pesat berpotensi menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Setiap negara perlu merumuskan strategi yang efektif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tercipta keseimbangan antara populasi dan ketersediaan sumber daya.

Hasil ini sejalan dengan teori *human capital*, yang memberikan penjelasan bahwasanya pertumbuhan penduduk yang pesat dapat berdampak negatif pada pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, sehingga menurunkan kualitas penduduk. Hal ini menyebabkan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja modern, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan. Dalam teori ini, pertumbuhan penduduk yang pesat akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, yang dengan hal ini bisa meningkatkan kemiskinan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dampak belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu rentang tahun 2019-2023 dianalisis melalui metode kuantitatif dengan pendekatan ekonometrik. Data sekunder yang digunakan berasal dari BPS, DJPK, artikel ilmiah, dan sumber internet. Temuan ini bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel melalui analisis statistik. Analisis regresi data panel

dipakai guna memberikan pengukuran terhadap pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam wilayah temuan. Penelitian ini menggunakan model regresi berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Di mana:

Y_{it}	= Tingkat Kemiskinan (Persentase)
X_{1it}	= Belanja Pemerintah Daerah (Persentase)
X_{2it}	= Tingkat Pengangguran Terbuka (Persentase)
X_{3it}	= Laju Pertumbuhan Penduduk (Persentase)
α_i	= Koefisien Intersept
β_1	= Koefisien Variabel Independen
i	= Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (<i>Cross Section</i>)
t	= Tahun 2019-2023 (<i>Time Series</i>)
ϵ	= <i>Error Term</i>
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien Regresi

HASIL PENELITIAN

Hasil Perhitungan dan Interpretasi Data

Terdapat beberapa tahapan pengujian awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan uji. Uji Chow dan Hausman diterapkan untuk memilih di antara tiga model analisis data panel (CEM, REM, dan FEM). Pemilihan model ini sangat krusial untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan relevan dengan penelitian.

Dengan demikian, hasil dari uji estimasi terbaik dalam penelitian ini terpilih FEM atau *fixed effect model*.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini sudah lulus uji asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada temuan ini mencakup Uji F, Uji t, serta uji koefisien determinasi (R^2). Data diolah memakai perangkat lunak E-Views 12.

Hasil Uji T

Uji T dipakai guna mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel bebas dalam memberikan penjelasan terhadap variasi variabel terikat. Berbagai faktor berikut mempengaruhi variabel dependen secara parsial:

Berdasarkan hasil uji t pada variabel belanja pemerintah daerah (X_1), diperoleh nilai t hitung sebesar $2.203462 < t$ tabel yaitu 2.80 dan nilai sig sebesar $0.0096 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa belanja pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. Hasil uji t pada variabel tingkat pengangguran terbuka (X_2), diperoleh nilai t hitung sebesar $2.831178 > t$ tabel yaitu 2.80 dan nilai sig sebesar $0.0383 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. Dan hasil uji t pada variabel laju pertumbuhan penduduk (X_3), diperoleh nilai t hitung sebesar $2.538213 < t$ tabel yaitu 2.80 dan nilai sig sebesar $0.0276 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu.

Hasil Uji F

Analisis uji F dilakukan guna menguji hipotesis mengenai pengaruh antara variabel independen dan tingkat kemiskinan. Pengujian ini akan memberikan informasi mengenai signifikansi pengaruh berbagai variabel tersebut, baik secara simultan ataupun parsial. Digunakan tingkat signifikansi 5% (0,05).

Hasil uji F memberikan petunjuk bahwasanya nilai hitung (47,40135) jauh > 2,80. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh (0,000000) lebih kecil daripada taraf signifikansi 5%. Berbagai faktor seperti belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan penduduk diartikan memengaruhi tingkat kemiskinan di tiap kabupaten/kota Provinsi Bengkulu.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Besar pengaruh belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota Provinsi Bengkulu dapat diketahui melalui koefisien determinasi.

Sesuai hasil analisis, bisa diberikan kesimpulan bahwasanya ketiga variabel independen berpengaruh sangat kuat terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu, dengan nilai *adjusted R-Square* sebesar 93,1195%. Jumlah sisa 6,8805% adalah hasil dari variabel tambahan yang tidak dimasukkan dalam model temuan ini.

Pembahasan

Analisis ini menerapkan model regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Temuan ini menghasilkan persamaan yaitu:

$$Y = 15.51601 - 0.076621 \cdot X_1 + 0.080085 \cdot X_2 + 0.051425 \cdot X_3$$

Analisa nilai koefisien regresi tersebut dapat di simpulkan berikut ini:

Koefisien regresi variabel X₁ (belanja pemerintah daerah) bernilai -0.076621. Perubahan 1% pada X₁ menyebabkan penurunan yang setara pada Y, asalkan variabel-variabel lainnya tidak ikut berubah. Sebaliknya, jika variabel X₁ turun 1%, variabel Y akan meningkat 7%. Koefisien regresi variabel X₂ (tingkat pengangguran terbuka) menunjukkan nilai 0.080085. Variabel Y meningkat 1% jika variabel lain tetap dan variabel X₂ meningkat 1%. Namun, jika variabel X₂ turun 1%, variabel Y akan menurun sebesar 8%. Koefisien regresi variabel X₃ (laju pertumbuhan penduduk) memiliki nilai 0.051425. Ketika variabel lain tidak berubah dan X₃ meningkat 1%, variabel Y meningkat 1%. Sebaliknya, jika X₃ turun 1%, variabel Y akan turun 5%.

Tabel 8. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Kab/Kota	<i>ai</i>	X ₁	X ₂	X ₃
Kota Bengkulu	3.811594	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Bengkulu Selatan	3.042905	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Bengkulu Tengah	-5.806532	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Bengkulu Utara	-2.130270	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Kaur	2.893738	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Kepahiang	-0.442737	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Lebong	-3.509933	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Muko-Muko	-3.201686	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Rejang Lebong	1.658992	-0.076621	0.080085	0.051425
Kab. Seluma	3.683929	-0.076621	0.080085	0.051425

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel diatas memberikan petunjuk bahwasanya kabupaten/kota yang mempunyai nilai pengaruh tertinggi adalah Kota Bengkulu dengan nilai pengaruh sebesar 3.811594, dan yang kedua adalah kabupaten Seluma dengan nilai pengaruh sebesar 3.683929. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Peningkatan jumlah penduduk memicu sejumlah persoalan ekonomi dan sosial yang kompleks. Di antaranya adalah kemiskinan yang meluas, kesenjangan pendapatan

yang semakin lebar, serta tingginya angka pengangguran. Kurangnya lapangan kerja dapat menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka. Dan Provinsi Bengkulu menghadapi masalah ketimpangan pembangunan, terutama setelah pemekaran wilayah. Dan faktor yang juga dapat menyebabkan kemiskinan di daerah perkotaan adalah tingginya tingkat urbanisasi, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar.

Tidak hanya berfokus pada dua kabupaten/kota dengan nilai tertinggi saja, berikut terdapat dua Kabupaten/Kota dengan nilai effect terendah, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar -5.806532 dan Kabupaten Lebong yaitu sebesar -3.509933. Kabupaten Bengkulu Tengah dan Lebong memiliki kekayaan SDA, meliputi sektor pertanian, perkebunan, serta pertambangan yang menjadi pilar utama perekonomian daerah. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Pembangunan infrastruktur yang tepat di kedua daerah ini seperti jalan raya dan akses listrik, memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, terutama distribusi hasil bumi dan barang pertanian dari desa ke pusat pasar. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemanfaatan SDA serta pengembangan infrastruktur.

Dukungan pemerintah baik dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi maupun bantuan sosial juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah daerah secara aktif melaksanakan program-program yang langsung merespon kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan distribusi bantuan kepada keluarga pra-sejahtera. Kedua kabupaten ini tampaknya memiliki kebijakan serta tata kelola yang lebih efektif dalam mengelola anggaran daerah dan program pengentasan kemiskinan apabila di-*compare* dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan teori distribusi pendapatan (*income distribution theory*), yang menjelaskan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis regresi menggunakan FEM memberikan petunjuk bahwasanya koefisien variabel belanja pemerintah daerah bernilai -0.076621 dengan probabilitas 0.0096. Studi ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan belanja daerah belum memberikan hasil yang optimal di Provinsi Bengkulu. Karena belanja pemerintah daerah memiliki dampak yang positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, terutama jika digunakan secara tepat dan efisien untuk mendukung sektor-sektor yang dapat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Sari (2024) dan Karuniawan & Soelistyo (2022), menyatakan belanja pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, dan dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah, maka tingkat kemiskinan menurun. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor produktif lainnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Ekspansi ekonomi memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, menaikkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup secara umum. Kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Misalnya, belanja pendidikan yang efektif dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut hasil regresi FEM, koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,080085 dengan probabilitas 0,0383. Temuan ini menguatkan hipotesis bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor primer yang mendorong meningkatnya kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Tingkat pengangguran terbuka berperan besar dalam menentukan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin besar peningkatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penurunan pengangguran melalui penciptaan lapangan

kerja yang layak dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Temuan ini selaras dengan temuan Fadhilah et al., (2023), Agustina et al., (2018), Putra & Arka (2018), dan Hasballah (2021), yang memberikan petunjuk bahwasanya tingkat pengangguran terbuka memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Praja et al., (2023), menemukan bukti empiris yang kuat mengenai korelasi positif dan signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan. Hal ini selaras dengan teori klasik ekonomi yang memberikan pernyataan bahwasanya peningkatan pengangguran menyebabkan kemiskinan, karena penganggur kehilangan pendapatan utama dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Teori Keynesian menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan. Pengangguran yang berkepanjangan dapat mendorong masyarakat ke dalam kemiskinan, terutama jika mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian alternatif.

Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien variabel laju pertumbuhan penduduk adalah 0.051425 dengan probabilitas 0.0276. Hasilnya memberikan petunjuk bahwasanya laju pertumbuhan penduduk memiliki efek positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di semua kabupaten dan kota Provinsi Bengkulu. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki dampak yang kompleks terhadap tingkat kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Oleh karena itu, kebijakan yang mengelola pertumbuhan penduduk, seperti program keluarga berencana dan peningkatan kualitas layanan publik, sangat penting untuk menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwasanya laju pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut menyatakan sama bahwa hasil tersebut sesuai dengan hipotesis, bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini selaras dengan teori *human capital* yang memberikan pernyataan bahwasanya pertumbuhan penduduk yang cepat dapat berdampak negatif pada pembangunan SDM, khususnya pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, menyebabkan penurunan kualitas penduduk.

Temuan ini mendukung temuan dari Fauzi et al., (2022), yang memberikan pernyataan bahwasanya laju pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, Praja et al., (2023), juga menemukan bahwasanya pertumbuhan penduduk berdampak positif signifikan terhadap kemiskinan. Kedua penelitian tersebut mengonfirmasi hipotesis bahwa pertumbuhan penduduk memengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil ini konsisten dengan teori *human capital*, yang memberikan penjelasan bahwasanya pertumbuhan penduduk yang pesat dapat berdampak negatif pada pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, sehingga menurunkan kualitas penduduk. Hal ini menyebabkan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja modern, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan. Dalam teori ini, pertumbuhan penduduk yang pesat akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, yang dengan hal ini bisa meningkatkan kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Hasil temuan mengungkap bahwasanya variabel belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. Variabel belanja pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif, sedangkan dua variabel lainnya memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan.

Dengan demikian, variabel belanja pemerintah daerah memiliki potensi dalam mengurangi kemiskinan. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan program sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki implikasi negatif yang kuat terhadap kemiskinan. Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan. Dan variabel laju pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan ketersediaan sumberdaya ekonomi dapat meningkatkan tekanan pada infrastruktur, lapangan kerja, dan layanan sosial.

Jadi, penelitian ini mengangkat isu kemiskinan di Provinsi Bengkulu, yang merupakan masalah sosial relevan dan mendesak. Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan berbagai teori seperti teori Keynesian, teori keseimbangan pasar tenaga kerja, teori Malthusian, dan teori human capital.

Saran

Temuan ini menunjukkan dan membantu untuk pembuat kebijakan perlu lebih memperhatikan belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka dan laju pertumbuhan penduduk. Diharapkan pemerintah memperbaiki dan menyempurnakan program dan kebijakan yang dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan belanja pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283.
- Anggraeni, S., & Haryanto, T. (2020). Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 123–134.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)*, 2022-2023. Bengkulu.Bps.Go.Id. <https://bengkulukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwIzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)*, 2023. Sumsel.Bps. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTg4IzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Bastian, I., Saat, S., & Sumiharti, Y. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 872–882.
- Ekaputri, R. A., Barika, Azansyah, & Zulyanto, A. (2023). Analysis of Economic Growth, Agglomeration and Poverty in Southern Sumatra. *Jurnal Ekonomi*, 11(1), 36–45.
- Fadhilah, M. H., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1–15.
- Fadlillah, N., Dewi, A. S., & Sukiman. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 11(1), 18–26.
- Fauzi, R. N., Febriani, R. K., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 118–122.
- Febriani, R. E., Yefriza, R. A. E., Ekaputri, R. A., Sitorus, A., & Putri, N. T. (2021). Inflation, Unemployment, and Economic Growth: Implication on Poverty Level in Bengkulu Province. *BISIC 2020: Proceedings of the 3rd Beehive International Social Innovation Conference*, 1–8.

- Hasanudin, M. L. M. (2019). *Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Daerah, Besaran UMK, Inflasi, dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2017*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hasballah, I. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(1), 38–47.
- International Labour Organization. (2015). *Unemployment and Labour Market Trends*. International Labour Organization.
- Karuniawan, J. A., & Soelistyo, A. (2022). Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(3), 106–119.
- Napitupulu, F., Hutapea, R., & Siregar, S. (2021). *Analisis Regresi Data Panel*. PT Indeks.
- Panjaitan, A., & Anitasari, M. (2023). Analysis of the Effect of Inflation, Open Unemployment Rate, and Poverty on Economic Growth in Bengkulu Province. *Proceedings of Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business, and Accounting*, 183–187.
- Praja, R. B., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Jurnal Ecoplan*, 6(1), 78–86.
- Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(3), 416–444.
- Putri, R. A., Zamzami, & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107–122.
- Sari, N. I. (2024). Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022. *Jurnal Ekodestinas*, 2(1), 17–35.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Anchor Books.
- Septadarmas, A. C., & Rambe, R. A. (2023). Analysis of the Influence of Population Growth, Education, and Health on Poverty in Indonesia from 2018 to 2022. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), 129–142.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education Limited.